1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. **Perkembangan Inflasi Daerah Dan Atau Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting, Barang Lainnya Dan Jasa Serta Risko Kedepan**.

    Pengendalian Inflasi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah dan daya beli masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang menggunakan IPH sebagai salah satu indikator perkembangan harga pangan secara rutin dengan melakukan pemantauan terhadap harga, pasokan dan distribusi komoditas pangan strategis.

    Pada Triwulan Ke III Periode Juli-September 2026 Perkembangan harga pangan di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi, tekanan harga semakin terlihat pada bulan September 2026 terutama pada komoditi cabe merah, beras dan cabe rawit. Selama juli sampai September 2026 perkembangan IPH Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi sejalan dengan perubahan kondisi produksi, pasokan, permintaan dan distribusi pangan. Pada periode September tekanan harga meningkat, berdasarkan data yang tersedia sampai 18 september 2026 IPH rokan hulu tercatat sebesar 4,59%. Komoditas yang memberikan andil terhadap kenaikan tersebut adalah : komoditas cabe merah (2.7006) %, beras (1,1982)%, cabe rawit (0,4922)%. Komoditas yang perlu mendapat perhatian utama yaitu komoditas :

    1. Cabe merah dan cabe rawit mengalami tekanan harga dan menjadi penyumbang utama kenaikan IPH, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan produksi lokal , penguatan kelompok tani dan pemamfaatan P2L.
    2. Beras memmberikan andil cukup besar terhadap kenaikan IPH, pemantauan stok, harga dan kelancaran distribusi perlu dilakukan.
    3. Daging ayam ras dan telur ayam ras perlu dipantau karna dipengaruhi harga pakan, biaya produksi dan pasokan dari daerah pemasok.
    4. Minyak goreng perlu dipantau dari sisi ketersediaan, harga dan kelancaran distibusi khususnya minyak goreng bersubsidi/minyak kita.
    5. Bawang merah dan komoditas pangan lainnya tetap dilakukan monitoring sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan pasokan dan harga.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

    Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Di Daerah

    Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi triwulan III Tahun 2026 antara lain :

    Untuk Identifikasi permasalahan sebagai daerah Non IHK yaitu :

    1. Fluktuasi harga komoditas pangan strategis khususnya cabe merah.
    2. Ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain artinya sebagian kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi dari luar Rokan Hulu sehingga harga dapat terpengaruh oleh kondisi produksi, harga dan distribusi daerah pemasok.
    3. Produksi pangan lokal belum stabil sepanjang tahun artinya produksi beberapa komoditas khususnya hortikultura seperti cabe yang dipengaruhi musim cuaca, dan

ketersediaan air.
4. Perubahan cuaca yang dapat memproduksi pangan.
5. Belum optimalnya integrasi data harga, stok dan produksi sebagai dasar pengambilan keputusan.
6. Belum optimalnya kesinambungan pasokan komoditas strategis artinya pada periode tertentu terjadi kekurangan pasokan sehingga dapat mendorong kenaikan harga ditingkat konsumen.
7. Biaya distribusi dan transportasi relatif tinggi artinya jarak antara sentra produksi, distributor dan pasar dapat mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok dari hulu sampai hilir artinya intervensi harga belum di dukung oleh data produksi, stok dan distribusi.
8. Ketersediaan data harga dan stok belum sepenuhnya terintegrasi artinya data antar OPD masih perlu di perkuat sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kenaikan harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Pada triwulan ke III Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui TPID melaksanakan pengendalian inflasi pada 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

1. Keterjangkauan harga
   - Melakukan pemantauan pada perkembangan harga pangan kebutuhan pokok dan penting (Bapokting secara berkala).
   - Melakukan analisis perkembangan IPH sebagai daerah Non IHK.
   - Berkordinasi dalam pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.
   - Melakukan evaluasi terhadap perkembangan harga komoditas strategis khususnya cabe merah, beras dan cabe rawit.

2. Ketersediaan pasokan
   - Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk mengetahui kondisi stok dan ketersediaan pangan.
   - Mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama komoditas yang mengalami gejolak harga.
   - Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan cabe merah, bawang merah, telur, daging ayam ras.
   - Mengantisipasi potensi kekurangan pasokan melalui koordinasi daerah pemasok.
3. Kelancaran distribusi
   - Melakukan pemantauan terhadap distribusi pangan dan produsen/distributor sampai di pasar.
   - Mengidentifikasi hambatan distribusi berpotensi menyebabkan kenaikan harga.
   - Melakukan koordinasi dengan distributor dan OPD terkait apabila terjadi gangguan pasokan.
4. Komunikasi efektif
   - Melaksanakan koordinasi TPID secara berkala
   - Menyampaikan perkembangan IPH dan harga pangan kepada pimpinan sebagai bahan

pangan kebijakan.
    - Melakukan koordinasi dengan TPID Provinsi Riau dan instansi terkait.
    - Menyusun laporan perkembangan harga dan pengendalian inflasi triwulan III tahun 2026.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Rokan Hulu pada triwulan III tahun 2026 dilakukan untuk mengetahui efektifitas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menjaga stabilitas harga. Perkembangan harga beberapa komoditas pangan mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga didaerah masih dipengaruhi oleh perubahan pasokan, produksi, distribusi, permintaan masyarakat, kondisi cuaca serta ketergantungan pasokan terhadap daerah lain. Oleh karena itu kebijakan pengendalian inflasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan responsive terhadap perubahan harga komoditas. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan III telah dilaksanakan melalui pemantauan harga dan IPH, penguatan koordinasi TPID serta pelaksanaan berbagai kegiatan stabilisasi pasokan dan harga namun masih diperlukan penguatan intervensi pada komoditas yang mengalami kenaikan harga dan peningkatan kecepatan respon ketika terjadi kenaikan IPH.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan IPH, harga komoditas pangan strategis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan III tahun 2026 diperlukan beberapa langkah kebijakan sebagai berikut :

   1. Memperkuat monitoring harga IPH secara berkala, terutama terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPH Kabupaten Rokan Hulu.
   2. Meningkatkan kecepatan respons terhadap kenaikan harga dengan melakukan rapat koordinasi TPID apabila terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan atau IPH menunjukkan tren meningkat.
   3. Menjaga ketersediaan dan kontinuitas pasokan pangan khususnya komoditas pangan strategis.
   4. Memperkuat produksi pangan lokal melalui dukungan kepada kelompok tani, bapoktan dan pelaku usaha termasuk pengembangan komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga.
   5. Meningkatkan pelaksanaan gerakan pangan murah dan kegiatan stabilisasi harga.
   6. Memperkuat koordinasi, distribusi pangan termasuk pemantauan jalur distribusi, ketersediaan stok dan biaya transportasi untuk mengurangi potensi peningkatan harga akibat gangguan distribusi.
   7. Melakukan pemetaan komoditas penyumbang kenaikan IPH sehingga intervensi pemerintah dapat lebih focus kepada komoditas yang memiliki pengaruh terbesar terhadap perubahan harga.
   8. Memperkuat komunikasi kebijakan kepada masyarakat termasuk penyampaian informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan pangan dan pelaksanaan program stabilisasi harga untuk mencegah kepanikan atau pembelian berlebihan.